

**Penguatan Literasi Kebijakan Pendidikan bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) Hong Kong melalui Workshop Pendidikan**
*Strengthening Educational Policy Literacy for Indonesian Migrant Workers (PMI)
in Hong Kong through Educational Workshops*

Ebni Sholikhah^{1*}, Mami Hajaroh², Maryani³, Muhammad Saiful Anwar⁴

¹Universitas Negeri Yogyakarta

²Universitas Negeri Yogyakarta

³Universitas Negeri Yogyakarta

⁴Universitas Negeri Yogyakarta

Email: ebnisholikhah@uny.ac.id, mami_hajaroh@uny.ac.id, maryani@uny.ac.id,
saifulanwar@uny.ac.id

*Corresponding author: Ebni Sholikhah (ebnisholikhah@uny.ac.id)¹

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, dengan tujuan untuk memperkuat literasi kebijakan pendidikan agar mereka mampu memilih program dan lembaga pendidikan yang sesuai. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode workshop, dengan pendekatan pemberdayaan yang diadaptasi dari teori Adi (2008). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: (1) PMI merasa puas terhadap pelaksanaan pemberdayaan dari berbagai aspek yang diukur, yaitu respons, partisipasi, pemberdayaan, dampak, dan kesesuaian; dan (2) berdasarkan evaluasi kuantitatif, workshop ini terbukti mampu meningkatkan literasi kebijakan pendidikan para peserta. PMI tidak hanya memahami kebijakan pendidikan Indonesia, tetapi juga mampu mengaplikasikan pemahaman tersebut melalui penyusunan rencana aksi dalam bentuk "sungai kehidupan" sebagai panduan untuk memilih program dan lembaga pendidikan yang sesuai dengan target pendidikan dan karier setelah masa kerja mereka berakhir.

Kata Kunci: Literasi kebijakan pendidikan; Pekerja migran Indonesia; Pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

This article presents the outcomes of a community service initiative aimed at Indonesian Migrant Workers (PMI) in Hong Kong, with the objective of strengthening their literacy in educational policy to support informed decisions in selecting appropriate educational programs and institutions. The activity was conducted in the form of a workshop, managed using an empowerment approach adapted from Adi's theory (2008). The results indicate that: (1) participants expressed satisfaction with the empowerment program across all measured aspects, including responsiveness, participation, empowerment, impact, and relevance; and (2) based on quantitative evaluation, the workshop effectively enhanced participants' understanding of Indonesia's educational policies. Moreover, participants were able to apply this knowledge by developing action plans in the form of a "life river" map to guide their choices in pursuing education and career goals after completing their employment abroad.

Keywords: Education Policy Literacy; Indonesian Migrant Workers; Community service

PENDAHULUAN

Menjadi pekerja diluar negeri sebagai migrant memang sangat menjanjikan dari segi finansial. Bahkan, salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar berasal dari pekerja migran. Atas remiten yang dikirim ke Indonesia mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa negara. Tidak tanggung-tanggung, jumlah remiten yang dikirim mencapai 10% dari APBN. Tahun 2022 terjadi lonjakan jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 42% yang juga diiringi dengan peningkatan remiten yang akan diterima negara. Peningkatan jumlah migrant disebabkan oleh menurunnya kasus Covid-19 di sejumlah negara tujuan dan kembali membuka pintu imigrasi.

Pekerja migran adalah orang yang berpindah sementara dari negara asal ke negara lain untuk bekerja (International Labour ORganization, n.d.). Pekerja Migran Indonesia berada hampir di seluruh negara-negara di dunia dengan wilayah penempatan terbesar di Asia dan Afrika. Hongkong adalah negara tujuan dengan penempatan PMI tertinggi yang mencapai 39,8% (24753 pekerja) dari seluruh pekerja migran yang dikirim dari Indonesia. Para pekerja migran didominasi oleh perempuan (62%) sejalan dengan peluang kerja yang tersedia mayoritas di sektor domestik. Rata-rata pekerja sector domestic mendapatkan gaji \$HK 3712 atau Rp

7.000.000 (Mustahab, 2022). jumlah yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan pekerja sector domestik di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu pendorong masyarakat Indonesia untuk bermigrasi.

Akan tetapi, menjadi pekerja migran sejatinya bukanlah tujuan utama mereka. alasan ekonomi merupakan alasan terbesar untuk bermigrasi, disamping alasan non ekonomi seperti alasan sosial, pendidikan, atau alasan psikologi (Bali et al., 2019). Karena kesulitan melanjutkan pendidikan, mereka tidak punya pilihan selain menjadi pekerja migran berketerampilan rendah. Pekerjaan sektor formal rata-rata membutuhkan gelar sarjana, kecil kemungkinan bagi mereka mendapatkan pekerjaan yang baik di dalam negeri dengan tingkat pendidikan yang rendah. tingkat pendidikan PMI mayoritas lulusan SMA, SMP, dan SD (BP2MI, 2022). Hal ini senyampang dengan data BPS (2022) yang menyebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia didominasi *unskilled labour* (tenaga kerja tidak terampil) dengan tingkat pendidikan SMA 65,94%(Badan Pusat Statistik, 2021).

Meskipun menjadi pekerja migran cukup membanggakan, namun faktanya mereka memiliki sejumlah resiko yang mungkin dialami. Resiko yang dimaksud antara lain pelanggaran kontrak kerja, kondisi kerja dan hidup yang buruk, ketidakbebasan

untuk beraktivitas, pelecehan dan kekerasan, kerja paksa, dan jerat hutang (International Labour ORganization, n.d.). Terdapat sejumlah kasus yang pernah dialami oleh pekerja migran asal Indonesia. Berdasarkan data P2MI tentang aduan PMI, mayoritas aduan berisikan ingin dipulangkan, rekrutmen ilegal, dan PMI gagal berangkat. Meskipun demikian, banyak pula kasus lain yang menimpa PMI di Hong Kong sebagai lokasi penempatan terbesar PMI. Kasus-kasus tersebut antara lain pemerkosaan oleh majikan sendiri (*KJRI Hong Kong Koordinasi Dengan Aparat Terkait Pemerkosaan Pekerja Migran : Okezone News*, 2021), terjerat kasus peredaran narkoba hingga dipenjara selama 20 tahun (*Pekerja Migran Asal Indramayu Dipenjara Di Hongkong Selama 20 Tahun, Keluarga Minta Kejelasan*, 2022), serta beberapa kasus penipuan online melalui sarana medsos seperti WA, We-chat, FB maupun SMS (*Interpol Indonesia*, 2021). Kasus penipuan juga pernah dialami oleh PMI ketika menempuh pendidikan tinggi. Salah satu contoh kasus pernah dialami Yuliana Arlina Medhe yang terjebak oleh lembaga pendidikan luar negeri. Setelah dua tahun wisuda, yang bersangkutan tidak mendapatkan transkrip nilai dan ijazahnya diragukan keasliannya. Kasus ini membuktikan bahwa posisi PMI meskipun secara finansial cukup menjanjikan namun

rentan terhadap berbagai masalah, salah satunya dalam sector pendidikan.

Pendidikan secara tidak langsung merupakan salah satu factor penting dalam kehidupan PMI. Di antara banyak faktor yang mempengaruhi migrasi, pendidikan menjadi factor penentu terutama dalam migrasi jangka panjang. Pendidikan tidak hanya menentukan mobilitas manusia, tetapi juga berkorelasi positif dengan pendapatan yang meningkat. Bukti empiris menunjukkan bahwa bagi orang-orang di negara berkembang, tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih baik negara tujuan menjadi factor penarik emigrasi (Handler, 2018). Namun sebaliknya, peningkatan pendapatan dan tingkat pendidikan selama menjadi migran dapat mendorong mereka untuk segera kembali ke Indonesia.

Meskipun tujuan awal menjadi pekerja migran, namun PMI juga termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyaknya PMI yang melanjutkan studi hingga sarjana baik di Universitas Terbuka maupun di Universitas Luar Negeri yang berada di Hong Kong. PMI termotivasi memperbaiki nasibnya dengan studi ke jenjang sarjana agar lebih sukses ketika kembali ke Indonesia (*Saya Kuliah Untuk Buktikan Buruh Migran Bisa Berpendidikan*, 2018). Meskipun pmi memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk menempuh pendidikan, namun

mereka memiliki permasalahan serius terkait pemilihan program dan Lembaga pendidikan yang tepat dan diakui pemerintah Indonesia. Kasus penahanan ijazah atau sertifikat adalah salah satu dari sekian masalah yang mungkin dialami oleh PMI. Kemungkinan masih banyak PMI yang belum memahami bagaimana memilih program maupun Lembaga pendidikan yang memiliki aturan yang jelas dan ijazahnya dapat disetarakan ketika kembali ke Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena minimnya literasi kebijakan pendidikan para PMI. Semakin rendah tingkat pendidikan semakin rendah literasi kebijakan pendidikan yang dimiliki. Berdasarkan alasan itu, pemberdayaan dilakukan agar PMI literat terhadap kebijakan pendidikan Indonesia. Harapannya, mereka dapat menempuh program dan Lembaga pendidikan yang tepat sesuai dengan tujuan pendidikan dan masa depan karir mereka.

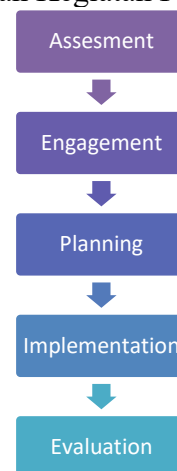
METODE PENELITIAN

Workshop pendidikan beruntun digunakan sebagai metode pemberdayaan. Workshop merupakan suatu diskusi dan kerja praktik tentang subjek tertentu, di mana sekelompok orang berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka (*Workshop Noun - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced American Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com*, n.d.). Workshop yang diselenggarakan melibatkan

ahli pendidikan untuk membagikan pengetahuan sekaligus melatih keterampilan menyusun rencana aksi kepada peserta yang datang. Workshop jenis beruntun dipilih menyesuaikan dengan muatan materi dan durasi pelatihan. Harapannya, peserta bukan hanya memahami materi namun juga dapat mengaplikasikan literasi kebijakan dan mendiskusikannya dengan pemateri sehingga mendapatkan umpan balik yang bermakna.

Adapun proses pemberdayaan dilaksanakan sesuai teori yang diadaptasi dari Adi (2008) (Isbandi Rukminto Adi, 2008) sebagai berikut

Gambar 1. Diagram Proses Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan



1. Tahap Assesment (Pengkajian)

Proses pengkajian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dimiliki kelompok sasaran. Pengkajian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang dialami oleh PMI Hong Kong berdasarkan studi literatur media massa maupun pengkajian secara faktual berdasarkan

pernyataan yang disampaikan PMI secara informal kepada tim pemberdaya. Pengkajian permasalahan juga disesuaikan dengan latar belakang bidang keahlian tim pengabdi.

Hasil pengkajian mengerucut pada masalah minimnya literasi kebijakan pendidikan para PMI Hong Kong sehingga tidak jarang mereka tertipu secara administratif. Beberapa PMI Hong Kong yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tinggi negara lain belum bisa mengantongi ijazah mereka. Hal ini disebabkan karena PMI belum sepenuhnya memahami kebijakan pendidikan pada masing-masing lembaga. Mereka tergiur untuk menempuh pendidikan tinggi dengan mudah ditengah kesibukannya sebagai pekerja namun mengenyampingkan sisi legalitas administratifnya. Di lain sisi, ijazah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga pendidikan yang ditempuh belum tentu diakui atau dapat disetarakan di Indonesia. Secara umum, para PMI belum memahami aneka kebijakan pendidikan seperti ini. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan literasi kebijakan pendidikan PMI sehingga terhindar dari berbagai kerugian pada sector pendidikan. Permasalahan ini juga divalidasi pihak KJRI Hong Kong. permasalahan ini nyata dihadapi dan perlu untuk direduksi agar tidak terulang di masa depan.

2. Tahap Planning (Perencanaan)

Pada tahap ini, tim pengabdi dengan para mitra merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilakukan guna mereduksi permasalahan yang ada. Pengabdi berkoordinasi dua kali secara daring dengan para mitra seperti KJRI Hong Kong, TCK Learning Center for Migrant Worker, dan PCIA Hong Kong untuk brainstorming alternative pendekatan pemberdayaan yang tepat untuk khalayak sasaran. Dalam tahapan ini juga meliputi penentuan target atau tujuan jangka pendek pemberdayaan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada akhirnya disepekat pemberdayaan diselenggarakan dalam bentuk workshop daring untuk meningkatkan literasi kebijakan pendidikan PMI Hong Kong untuk cerdas memilih peluang belajar selama bekerja.

3. Tahap Implementation (Pelaksanaan)

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop beruntun secara online selama tiga kali berturut-turut setiap hari minggu pada bulan Juli 2022. Kegiatan PPM dilaksanakan dalam format pelatihan daring (online) dengan memanfaatkan media zoom. Kegiatan pelatihan daring dapat memudahkan peserta untuk mengikuti acara secara fleksibel tanpa harus datang ke tempat acara. Pelatihan daring juga memudahkan tim pengabdi yang tidak harus melakukan perjalanan untuk sampai ke tempat khalayak sasaran (Hong-Kong) karena kondisi Covid-19 yang belum terkendali.

Pelatihan daring diselenggarakan dalam tiga kali pertemuan pada tiap akhir pekan. Waktu akhir pekan dipilih karena menyesuaikan waktu libur PMI. Adapun workshop disampaikan dengan ceramah, diskusi interaktif, serta praktik penyusunan *action plan* berupa rancangan pendidikan untuk mencapai target karir selama dan setelah menjadi PMI berdasarkan literasi kebijakan pendidikan Indonesia yang telah mereka pahami.

4. Tahap Evaluation (Evaluasi)

Metode evaluasi yang digunakan adalah metode Kickpatrick dengan tiga level yakni evaluasi reaksi, pembelajaran, dan perilaku. Level dampak tidak dilakukan karena berkaitan dengan dampak jangka panjang diluar durasi kegiatan PkM. Evaluasi Level 1, Reaksi (Reaction): mengukur kepuasan peserta selama kegiatan PPM berlangsung. Evaluasi Level 2, Pembelajaran (Learning): mengukur literasi kebijakan pendidikan PMI dari aspek pengetahuan. Evaluasi Level 3, Perilaku (Behaviour): menilai perilaku peserta setelah mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pendidikan Indonesia. Perubahan perilaku ini dapat dievaluasi dengan mengamati praktik pembuatan *action plan*. *Action plan* tersebut berisi tentang target karir setelah kembali ke Indonesia, target pendidikan untuk mencapai target karir tersebut, serta kemampuan mencari

dan memilih program dan lembaga pendidikan yang legal.

HASIL

Pemberdayaan dilakukan melalui workshop literasi kebijakan pendidikan. Literasi kebijakan merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan berdasarkan pada informasi pengetahuan (Jung, 2008). Sedangkan literasi kebijakan pendidikan dapat diartikan secara bebas sebagai kemampuan individu untuk mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan kebijakan pendidikan sebagai landasan pengambilan keputusan. Kebijakan Pendidikan akan menjadi dasar dalam menentukan arah setiap individu dalam menentukan pendidikan untuk masa depannya.

Sesuai dengan konsep literasi, bahwa seseorang yang terliterasi bukan hanya memahami apa itu kebijakan pendidikan, akan tetapi juga mampu menerapkan/ mengaplikasikan informasi itu untuk memilih dan memilah program pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Selain itu juga diharapkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhindar dari kerugian akibat salah memilih program dan lembaga pendidikan baik karena tidak sesuai dengan orientasi pekerjaan maupun karena alasan regulasi dan legalitas lembaga. Oleh karena itu, sudah seharusnya PMI mendapatkan literasi kebijakan pendidikan agar langkahnya lebih

tertata untuk meraih tujuan pendidikan dan tujuan hidup di masa depan.

Workshop pendidikan telah terlaksana sesuai dengan jadwal dan frekuensi yang direncanakan. Terdapat 29 PMI yang terlibat secara konsisten selama pemberdayaan berlangsung. Selama acara berlangsung, materi telah tersampaikan kepada khalayak sasaran yang terbagi kedalam tiga kelompok materi. Pertama urgensi pendidikan untuk semua (*education for all*) dan kebijakan pendidikan Indonesia. Materi pendidikan untuk semua menekankan pentingnya pendidikan bagi semua orang baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Materi ini penting untuk membekali pemahaman dasar para PMI bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga dan bisa ditempuh hingga akhir hayat. Materi kebijakan pendidikan membekali PMI untuk melihat program pendidikan baik dari jenjang maupun jenisnya. Bahasan ini juga memuat program-program pendidikan Indonesia maupun di Hong Kong yang bisa ditempuh para PMI.

Kelompok materi kedua membahas tentang memilih program pendidikan yang tepat serta peluang kerja setelah kembali ke Indonesia. Keterampilan memilih program pendidikan merupakan materi inti pada acara workshop. Keterampilan ini disampaikan kepada PMI agar mampu memilih program pendidikan yang tepat sesuai peraturan di

Indonesia dan sertifikatnya bisa disetarakan ketika kembali ke Indonesia. Materi lanjutan berupa peluang kerja setelah kembali ke Indonesia juga disajikan untuk memperluas wawasan para PMI mengenai jenis-jenis pekerjaan yang masih eksis dan mungkin dijalani setelah kembali ke Indonesia.

Materi kelompok ketiga merupakan praktik baik kesuksesan mantan PMI dalam belajar sambil bekerja, serta melatih dan menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) berkenaan dengan rencana studi dan karir masa depan. Dengan *action plan* tersebut diharapkan para PMI dapat memilih dan menentukan program dan lembaga pendidikan yang legal sesuai dengan regulasi kebijakan di Indonesia serta menunjang karir mereka pasca menjadi PMI.

Respon peserta dalam pemberdayaan sangat puas. Tim telah melakukan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang dituangkan kedalam angket online dengan skala Likert 1-5 (sangat tidak setuju – sangat setuju). Rata-rata peserta memberikan penilaian sangat baik dari kelima aspek yang diukur. Adapun hasilnya ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Evaluasi PMI terhadap Pelaksanaan Workshop Pendidikan

No	Aspek	Rata-rata Nilai
1	Pernyataan Respon	4,58
2	Partisipasi	4,53
3	Pemberdayaan	4,57
4	Dampak	4,68
5	Aspek Kesesuaian	4,42

Keterangan interpretasi nilai:

0,00-2,33 : rendah

2,34-3,66 : sedang

3,67-5,00 : tinggi

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa program penguatan literasi kebijakan bagi PMI Hong Kong dikatakan berhasil. Dari lima aspek yang diukur, kelimanya menunjukkan kepuasan yang tinggi. Pada aspek respon, rata-rata peserta memiliki respon yang baik. PMI merasa merasa bersemangat, dihargai, nyaman, senang, dan tertarik selama mengikuti workshop pemberdayaan. Pada aspek partisipasi, peserta merasa bahwa workshop memberikan ruang untuk aktif terlibat dalam diskusi, terutama mengenai tips memilih program pendidikan yang tepat sesuai minat mereka. Pada aspek *empowerment*, workshop telah memberdayakan/ mendorong peserta untuk menggali solusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada aspek dampak, para peserta merasa bahwa workshop menambah wawasan sekaligus keterampilan yang dapat mendorong mereka melakukan perubahan. Pada aspek kesesuaian, pola

workshop bermanfaat bagi profesi mereka dan dapat disebarluaskan untuk PMI lain.

Guna melihat perubahan perilaku setelah mendapatkan materi, para PMI membuat rencana aksi (*action plan*) berupa sungai kehidupan yang berisi tentang target karir setelah kembali ke Indonesia dan peluang *reskilling* maupun *upskilling* yang mungkin ditempuh selama menjadi PMI pada berbagai jalur pendidikan. Sesuai dengan tujuan PKM, kegiatan ini bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan pendidikan akan tetapi juga dapat menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk cerdas dalam memilih program pendidikan sesuai rencana hidup masing-masing. Karena pemberdayaan mengalami keterbatasan waktu untuk melihat dampak jangka panjang, perubahan perilaku setidaknya dapat diamati dari *action plan* yang telah disusun. Mayoritas para PMI dapat merencanakan masa depannya berdasarkan pengalaman yang ditempuh sebelumnya. Mayoritas PMI dapat menyusun rencana jangka panjang pasca menjadi PMI. Mayoritas PMI berencana untuk studi sampai ke perguruan tinggi dan berwirausaha.

PEMBAHASAN

Terlaksananya pemberdayaan telah direspon positif oleh para pihak yang diajak kerjasama (KJRI Hong Kong, PCIA Hong Kong, dan TKC Learning Center for Migrant Worker). Respon positif juga ditunjukkan oleh

para PMI dengan respon atau partisipasi aktif selama acara berlangsung. Dukungan yang baik dari berbagai pihak turut menyumbang terhadap kesuksesan sebuah acara. Dalam konteks ini, dukungan dari tim pengabdian, KJRI, PCIA dan TCKLC sebagai pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat sipil menjadi modal besar untuk melaksanakan kegiatan sampai selesai. Optimisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta merupakan langkah optimalisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sistem tata kelola kolaboratif pemerintah adalah langkah di abad ke-21 yang melahirkan system tata kelola yang mengedepankan kepentingan masyarakat (Haryono, 2012). Hal ini juga senyampang dengan teori *collaborative governance* yang menunjukkan adanya keberhasilan pelayanan masyarakat atas dukungan berbagai pihak.

Atas kerjasama berbagai pihak yang terlibat, pemberdayaan dapat tersampaikan kepada PMI sesuai rencana. Workshop hari pertama telah mampu menghimpun peserta hingga 50 meskipun pada sampai akhir acara tersisa 29 peserta. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dibandingkan acara yang pernah diselenggarakan KJRI sebelumnya. Konsistensi peserta dalam mengikuti acara menunjukkan ketertarikannya terhadap materi yang disampaikan dan

menunjukkan pentingnya workshop pendidikan bagi mereka.

Secara umum tujuan utama pemberdayaan untuk meningkatkan literasi kebijakan pendidikan di Indonesia, namun materi yang disampaikan secara parsial juga menarik minat para PMI. Terbukti dari hasil evaluasi yang mereka sampaikan menunjukkan hasil positif. Pekerja migran Indonesia faktanya masih membutuhkan intervensi berbagai pihak untuk meningkatkan wawasannya terkait kebijakan pendidikan. PMI memerlukan intervensi negara untuk melindungi diri sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (Kusdarini et al., 2021). Salah satunya adalah dengan membekali diri dengan wawasan kebijakan yang berkualitas agar terhindar dari segala bentuk penipuan ataupun ketidakpastian regulasi pendidikan yang ditempuh selama bekerja. Literasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang urgen untuk “diakrabkan” dengan para pekerja migran Indonesia. Literasi kebijakan pendidikan dapat membangun kesadaran pekerja migran Indonesia dalam memahami berbagai aspek pendidikan, terutama ketika menempuh program-program pendidikan di luar negeri.

Fakta yang menunjukkan adanya PMI yang tertipu dalam lembaga pendidikan tinggi salah satunya disebabkan karena keterbatasan wawasan dan pengalaman menempuh

pendidikan tinggi di luar negeri. Pemahaman informasi mengenai kebijakan pendidikan yang berlaku bagi warga Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh tenaga kerja wanita. Lemahnya posisi PMI sebagai “*blue collar worker*” membuat mereka semakin tak berdaya ketika berhadapan dengan pihak yang lebih berkuasa. Realita ini membuat Migrant membutuhkan perlindungan dan literasi agar tepat memilih program pendidikan yang legal dan diakui pemerintah Indonesia. Wawasan hukum yang mumpuni akan meningkatkan kapasitas TKI dan akan mampu menghadapi setiap permasalahan yang dihadapinya. Literasi hukum akan membangun kesadaran pekerja migran Indonesia dalam memahami berbagai aspek hukum, terutama yang terkait dengan aktivitas pekerja migran Indonesia (Kusdarini et al., 2021). Migran harus didukung oleh pemerintah, pemasok tenaga kerja swasta, agen tenaga kerja di luar negeri, serta pekerja migran itu sendiri. Tentu saja, para pekerja migran perlu mengakses informasi ini secara jelas, jelas, dan benar sesuai fakta (Aprillia et al., 2021).

Workshop Pendidikan menunjukkan betapa hausnya PMI dengan wawasan pendidikan. Hal ini senyampang dengan keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan begitu, mereka mendapatkan kunci untuk memperbaiki nasib sekaligus status

sosialnya. Workshop pendidikan telah menunjukkan hasil yang baik. Dari semua peserta yang terlibat ada 22 peserta yang mengerjakan post-test dan menunjukkan hasil yang baik. Lebih dari 75% soal mampu dijawab dengan benar oleh peserta. Hasil ini menunjukkan bahwa metode PPM mampu menguatkan literasi kebijakan para PMI dengan metode workshop. Namun, literasi bukan hanya diukur dengan aspek kognitif, penilaian produk atau karya juga dilakukan untuk mengukur keterampilan berliterasi.

Sesuai konteks pelatihan literasi kebijakan pendidikan, maka seseorang yang dikatakan terliterasi bukan hanya memahami suatu informasi, namun juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Para peserta telah mampu menyusun *action plan* berupa sungai kehidupan. Mereka dapat menggambarkan dan menjelaskan secara lisan dalam *break out room* tentang target karir setelah kembali ke Indonesia, target pendidikan untuk mencapai target karir tersebut, serta kemampuan mencari dan memilih program dan lembaga Pendidikan berdasarkan materi yang disampaikan sebelumnya. Kemampuan merancang dan menentukan pilihan program dan lembaga pendidikan sesuai dengan regulasi Pendidikan merupakan bentuk dari pengaplikasian literasi kebijakan Pendidikan itu sendiri. Temuan ini senyampang dengan teori *impact literacy*

concept yang menunjukkan bahwa literasi dampak mencerminkan pemahaman yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan dampak yang bermakna, tepat, dan realistis untuk menghasilkan manfaat di dunia nyata (Aprillia et al., 2021). Teori tersebut menerangkan bahwa dampak literasi dapat dirasakan individu maupun organisasi. Dalam kerangka pemberdayaan ini, dampak dapat ditunjukkan pada level individu yakni kemampuan untuk merencanakan target pendidikan yang tepat untuk menunjang karir masa depan setelah kembali ke Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak yang bekerjasama dalam mempersiapkan dan turut terlibat dalam acara antara lain KJRI Hong Kong, PCIA Hong Kong, TCK Learning Center for Migrant Worker. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Universitas Negeri Yogyakarta yang memberikan dana untuk melaksanakan acara pemberdayaan.

SIMPULAN

Beberapa diantara PMI yang berbondong-bondong merantau ke luar negeri untuk memperbaiki nasib bukan hanya dengan bekerja namun juga melanjutkan studi. Sayangnya banyak diantaranya yang tidak memahami kebijakan pendidikan Indonesia sehingga rawan memilih program maupun lembaga pendidikan yang sertifikatnya tidak

bisa disetarakan ketika kembali ke Indonesia. Resiko penipuan lembaga pendidikan ilegal pun bisa dirasakan oleh mereka yang tidak memahami ketentuan lembaga sebelum mendaftar. Menumbuhkan literasi kebijakan pendidikan merupakan hal penting yang harus ditanamkan agar PMI dapat memahami aneka kebijakan pendidikan sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih program dan lembaga pendidikan.

Pelaksanaan pemberdayaan dengan workshop pendidikan telah memberikan kepuasan kepada para PMI. Dengan demikian pemberdayaan direspon baik dan memberikan manfaat kepada para pesertanya. Workshop telah menumbuhkan pemahaman PMI terkait literasi kebijakan pendidikan terutama kebijakan negara Indonesia. Pemahaman PMI terkait kebijakan pendidikan Indonesia selanjutnya dapat diaplikasikan secara nyata dengan menyusun rencana aksi berupa sungai kehidupan. Sungai kehidupan memuat target pendidikan maupun target karir masa depan yang sesuai dengan kebijakan pendidikan Indonesia. Hasil ini membuktikan adanya dampak literasi bagi individu PMI untuk dapat memilih program dan lembaga pendidikan yang dapat menunjang karir pasca menjadi PMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, B., Widianingsih, I., Rachman, J. B., & Ningrum, S. (2021). The importance of improving literacy skills for Indonesian women migrant workers in the pre departure stage to support safe migration (SDG 10); gender sensitivity approach. *LibraryPhilosophyandPractice(e-Journal)*, 12.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1982/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>
- Bali, S., Chou Liu, M., & Hsuan Lin, H. (2019). Pursuing Higher Education Careers and The Process of Migration among Indonesia Female Migrant Workers in Taiwan. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 4(2), 302–317. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol4iss2pp302-317>
- BP2MI. (2022). *Data Pekerja Migran Indonesia Semester I 2022* (pp. 1–34) [Laporan Berkala]. Pusat Data dan Informasi (BP2MI). https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_05-08-2022_Laporan_Publikasi_Semester_1_2022.pdf
- Handler, H. J. (2018). Economic Links between Education and Migration: An Overview. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3189725>
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 1–7.
- International Labour ORganization. (n.d.). *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved 10 August 2022, from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122318.pdf
- Interpol Indonesia. (2021). <https://interpol.go.id/berita24.php>
- Isbandi Rukminto Adi. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Press.
- Jung, K. H. (2008, December). *An Empirical analysis of the policy literacy function: A focus on civic activities* [SNU Journal]. <https://space.snu.ac.kr/handle/10371/70019>
- KJRI Hong Kong Koordinasi dengan Aparat Terkait Pemerkosaan Pekerja Migran: Okezone News. (2021). <https://news.okezone.com/read/2021/07/01/18/2433558/kjri-hong-kong-koordinasi-dengan-aparat-terkait-pemerkosaan-pekerja-migran>
- Kusdarini, E., Puspitasari, C. D., Sakti, S. W. K., & Wahyuni, P. M. (2021). The Urgency of Legal Literacy for Indonesian Migrant Workers through Distance Education. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 399–416. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2317>
- Mustahab, A. A. (2022). Besaran Gaji TKI di Hong Kong Semua Profesi 2022. *Upah Kerja*. <https://www.upahkerja.com/2022/06/gaji-tki-hongkong.html>
- Pekerja Migran Asal Indramayu Dipenjara di Hongkong Selama 20 Tahun, Keluarga Minta Kejelasan. (2022). <https://jabarekspres.com/berita/2022/01/12/pekerja-migran-asal-indramayu-dipenjara-di-hongkong-selama-20-tahun-keluarga-minta-kejelasan/>
- Saya Kuliah untuk Buktikan Buruh Migran Bisa Berpendidikan. (2018). <https://tirto.id/saya-kuliah-untuk-buktikan-buruh-migran-bisa-berpendidikan-clqs>

workshop noun—*Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced American Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com.* (n.d.). Retrieved 23 August 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/workshop